PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat)

Oleh :
Tiara Zanatunnisa
21112164
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: Tiarazanatunnisa@ymail.com

ABSTRACT

Capital Budget is influenced by several factors, such as Regional Revenue and Equalization Fund. There is a phenomenon in 2014 and 2013 which showed that the variabels Regional Revenue and Equalization Funds increased but not followed by the Capital Budget. This study aims to determine how much influence the Regional Revenue and Equalization Funds to Capital Budget in the District and City in the Province of West Java.

The method used in this research is descriptive analysis and verification. Statistical tests used in the multiple regression analysis through the testing phase classical assumption test, regression analysis, partial correlation analysis, coefficient of determination analysis and hypothesis testing using SPSS.

The results of hypothesis in this study show that (1) Regional Revenue effect on Allocation Of Capital Budget, (2)Equalization Funds effect on Allocation Of Capital Budget.

Keywords: Regional Revenue, Equalization Funds and Capital Budget

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009).

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik, oleh karena itu alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat (I Putu Ngurah dan A.A.N.B Dwirandra, 2014).

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013).

Lembaga Survei Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL Indonesia menilai Pemerintah Kota Bogor minim dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih dominan Belanja Pegawai dibandingkan untuk Belanja Modal untuk publik. APBD Bogor termasuk yang cukup banyak mendapatkan alokasi anggaran dari pusat. Bahkan dari segi pertumbuhan anggarannya terus meningkat. (Syamsyudin Alimsyah, 2014).

Aset tetap merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambahkan asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alokasi belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk fasilitas publik (Setyowati dan Suparwati, 2012:118).

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang kemudian dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain – lain PAD yang sah (Halim, 2009:96).

Bupati Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Cirebon mengalami defisit, secara umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengalami penurunan. Realisasi pengeluaran Belanja Modal pun ikut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Sunjaya Purwadisastra, 2015). Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat".

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

2.1.2 Dana Perimbangan

Menurut Dedi, Iswahyudi dan Maulidah (2012:48) menjelaskan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009:171) menjelaskan bahwa Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal.

2.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Menurut Wandira (2013), Dana Perimbangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadapa Belanja Modal.
H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis Metode Penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif . Menurut Sugiyono (2014:147) pengertian metode desktiptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan metode *verifikatif* menurut Sugiyono (2010:13), metode *verifikatif* adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya :

X1 : Pendapatan Asli Daerah
X2: Dana Perimbangan
Variabel dependen (Dependent Variable) adalah variabel yang tergantung atau dapat dipengaruhi variabel lain. Sehingga yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain. Data-data yang digunakan diperoleh dari laporan realisasi APBD dan sudah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat

3.4.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh karena semua anggota populasi sebagai sampel yaitu seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat.

3.4.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2016 – Juni 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Pada analisis regresi linier berganda, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan model regresi tidak bias atau model regresi *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012:277). Melalui analisis regresi ini akan dilakukan pengujian terhadap kebijakan utang yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA).

3.6.2 Analisis Korelasi

Tujuan uji korelasi adalah untuk menguji apakah dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat ataukah tidak kuat, apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini:

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sumber: Sugiyono, 2012:250)

3.6.3 Analisis Koefisian Deteminasi

Tujuan analisis koefisien determinasi adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi (Kd) secara parsial dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

KD = beta x zero order x 100%

(Sumber : Gujarati, 2012:172)

Keterangan :
Kd = Koefisien Determinasi

Beta = Nilai Beta
Zero order = Nilai Zero Order

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel *independent* (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal sebagai variabel *dependen* (Y). Langkah-langkah pengujian statistik secara parsial sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t). Bunyi hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:
   H_0 :β1=0, Belanja Modal secara parsial tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah.
   Ha:β1≠0, Belanja Modal secara parsial dipengaruhi oleh Ukuran Pendapatan Asli Daerah.
   H_0 :β_2=0, Belanja Modal secara parsial tidak dipengaruhi oleh Dana Perimbangan.
   Ha:β_2≠0, Belanja Modal secara parsial dipengaruhi oleh Dana Perimbangan.
2. Menentukan tingkat signifikan
   Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam status penelitian.
3. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan
   Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria dengan membandingkan Hasil t hitung dengan tabel sebagai berikut:
   a) Jika t hitung ≥ t tabel maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya,
   b) Jika t hitung ≤ t tabel maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
   c) t tabel; dicari didalam tabel distribusi t student dengan ketentuan sebagai berikut,α = 0,05 dan dk = (n-k-1).
4. Penarikan Kesimpulan
   Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Belanja Modal dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya (tidak adanya) pengaruh signifikan.

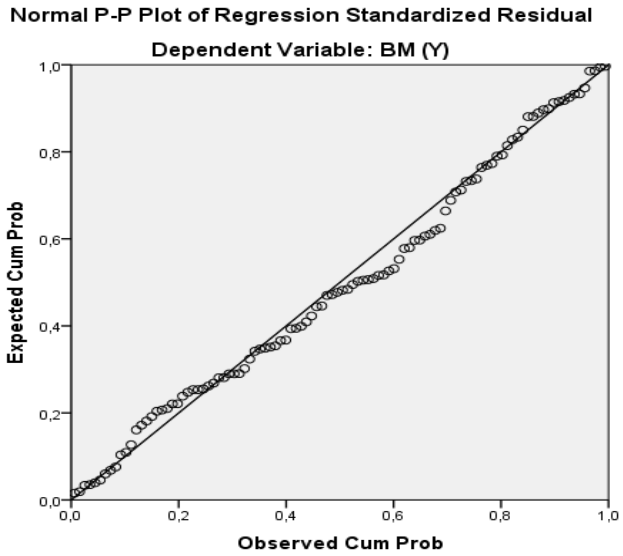
IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

1 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel pengganggu atau residu (*e*) memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang berdistribusi secara normal. Secara visual, deteksi normalitas residu dapat dilihat pada grafik probability plot. Jika titik-titik atau data residual menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan bantuan program SPSS 21.0 dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 4.4

Grafik Normal Probability Plots

Pada gambar grafik probability plots di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik atau data residu menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, hasil tersebut menunjukan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil pengujian secara visual yang tersaji pada gambar grafik probability plot di atas, dapat digunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikansi yang diperoleh jauh lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal. Hasil penguijan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,11108297
Most Extreme Differences	Absolute	0,098
	Positive	0,098
	Negative	-0,066
Kolmogorov-Smirnov Z		1,003
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,266

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji normalitas data, diketahui bahwa residu dalam model regresi yang akan dibentuk berdistribusi secara normal dikarenakan hasil pengujian menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,266 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian salah satu syarat untuk pengujian regresi telah terpenuhi.

a. Uji Multikolineritas

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi adanya hubungan yang sangat kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas yang dilibatkan dalam model regresi. Jika terdapat multikolinieritas, koefisien regresi menjadi tidak tentu

serta tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan koefisien determinasi yang sangat tinggi, namun sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada satupun koefisien regresi yang dinyatakan signifikan. Masalah multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai tolerance serta lawannya *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* yang diperoleh lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah multikolinearitas. Rangkuman hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Asumsi Multikolineritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD (X1)	0,702	1425
	DP (X2)	0,702	1,425

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

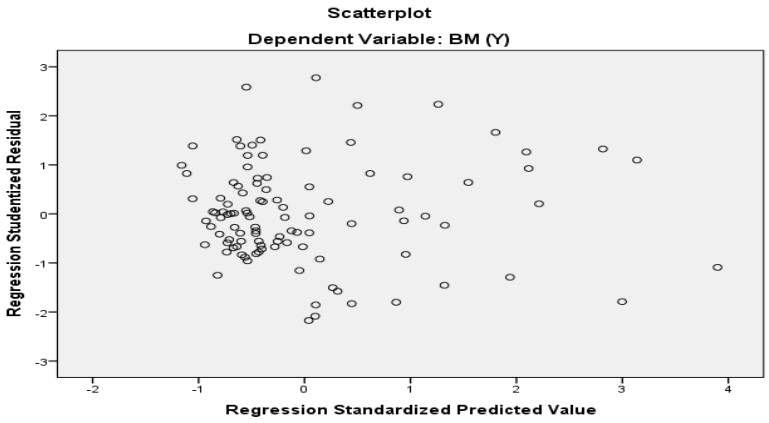
Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, sehingga asumsi untuk terbebas dari msalah multikolineritas telah terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji homogenitas varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik mensyaratkan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Apabila varians residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya heteroskedisitas adalah:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian meyempit), hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang ada menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal tersebut mengindikasikan model terbebas dari masalah heteroskedisitas.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 21.0, diperoleh grafik seperti berikut:



Gambar 4.5

Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas

Pada gambar grafik scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.

Untuk memperkuat hasil pengujian secara visual yang tersaji pada gambar grafik *scatterplot* di atas, dapat digunakan glejser test yang dilakukan dengan meregres setiap variabel bebas dengan nilai absolut residual (Abs_Res).

Jika nilai signifikansi yang diperoleh jauh lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil penguijan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas (Glejser Test)

Coefficients[a]

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1,932	0,056
	PAD (X1)	2,542	0,013
	DP (X2)	1,668	0,098

a. Dependent Variable: Abs.Res

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan glejser test, diketahui bahwa model regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikansi hasil regresi antara kedua variabel bebas dengan nilai Abs. Res jauh lebih besar dari 0,05, sehingga model telah memenuhi asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi ini didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu (*time series*) dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan (*t*) dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya (*t*-1). Masalah autokorelasi dapat di deteksi dari nilai Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara nilai dU dan 4-dU, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi. Rangkuman hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi (Durbin Watson Test)

dU	Durbin-Watson	4-Du	Kesimpulan
1,582	1,798	2,418	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

Nilai dU yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian ini diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan jumlah data observasi 104 dan 2 variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara nilai dU dan 4-dU. Hasil tersebut menunjukan jika model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.1.1 Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS 21.0, diperoleh hasil estimasi regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	-0,007	0,028		-0,236	0,814	

Tabel 4.8

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations
	B	Std. Error	Beta			Zero-order
PAD (X1)	0,546	0,034	0,735	15,404	0,000	0,886
DP (X2)	0,161	0,025	0,277	5,800	0,000	0,678

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,024 + 0,700\ X_1 + 0,142\ X_2$$

dimana:

Y = Belanja modal

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_1 = Pendapatan asli daerah

X_2 = Dana perimbangan

Nilai-nilai pada persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar -0,007 menunjukan besarnya rata-rata belanja modal ketika pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan bernilai 0 (nol).
b. Koefisien regresi untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,546 dan bertanda positif yang menunjukan setiap terjadi peningkatan 1 miliar pada PAD dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,546 miliar.
c. Koefisien regresi untuk dana perimbangan adalah sebesar 0,161 bertanda positif yang menunjukan setiap terjadi peningkatan 1 miliar pada DP dan variabel bebas lainnya diasumsikan dalam kondisi konstan, diprediksikan akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,161 miliar.

4.1.1.2 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukan derajat asosiasi atau keeratan hubungan yang terjadi antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan belanja modal. Hasil pengujian data menggunakan program SPSS 21.0, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Koefisien Korelasi

Correlations

		BM (Y)
PAD (X1)	Pearson Correlation	0,886**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	104
DP (X2)	Pearson Correlation	0,678**
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	104

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

Interpretasi untuk tabel di atas adalah sebagai berikut:

a. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pada tabel di atas, dapat dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,886 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat dikarenakan berada pada interval korelasi antara 0,80-1,000. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan semakin tingginya pendapatan asli daerah, akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya belanja modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal.

b. Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal

Pada tabel di atas, dapat dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,678 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,60-0,799. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan semakin besar dana perimbangan, akan diikuti pula oleh semakin meningkatnya belanja modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara dana perimbangan dengan belanja modal.

4.1.1.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini merupakan nilai yang menunjukan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan ekstensifikasi pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian data menggunakan program SPSS 21.0, disajikan pada tabel berikut:

Untuk mengetahui kontribusi pengaruh secara parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan (standardized coefficients) dengan zero-order yang merupakan korelasi parsial. Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Koefisien Determinasi

Model		Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
		Beta	Zero-order	
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,735	0,886	0,651
	Dana Perimbangan (X2)	0,277	0,678	0,187
Total Effect				**0,838**

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2016

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 65,1% terhadap realisasi Belanja Modal, sedangkan Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 18,7%, sehingga total kontribusi pengaruh yang diberikan oleh keduanya adalah sebesar 83,8%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial adalah uji t. Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pendapatan asli daerah Terhadap Belanja modal

Hipotesis I

Ho : $\beta_1 = 0$ Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ha : $\beta_1 \neq 0$ Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.

Kriteria pengambilan keputusan uji parsial:

1) Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
2) Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

Nilai t_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji parsial ini adalah sebesar 1,984 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan α = 5% dan df (n(104)-k(2)-1) 101 untuk pengujian 2 pihak. Rangkuman hasil pengujian hipotesis parsial dengan menggunakan program SPSS 21.0 disajikan pada tabel berikut:

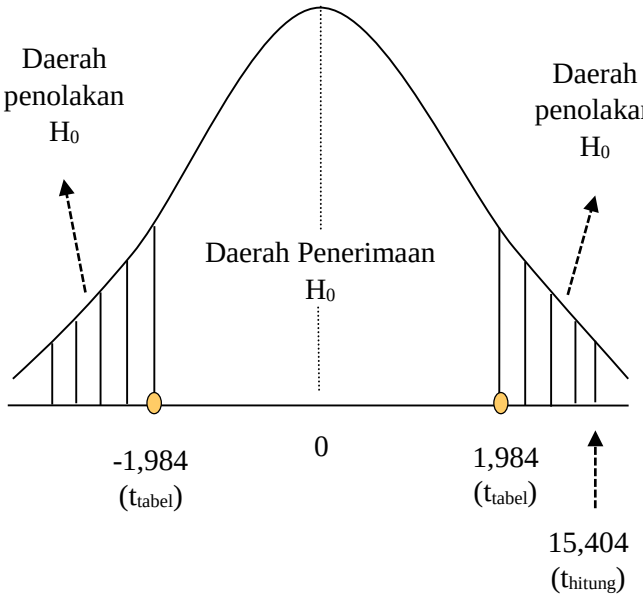
Tabel 4.10

Uji t (Parsial) Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig. t	α	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	15,404	1,984	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

Pada tabel di atas, dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal adalah sebesar 15,404. Secara visual, daerah penolakan Ho maupun penerimaan Ho dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.6

Kurva Hipotesis Parsial Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pada gambar kurva hipotesis parsial 4.6 di atas, dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar 15,404 berada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Pengaruh Dana perimbangan terhadap Belanja modal

Hipotesis II

Ho : $\beta_2 = 0$ Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ha : $\beta_2 \neq 0$ Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.

Kriteria pengambilan keputusan uji parsial:

1) Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
2) Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

Nilai t_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji parsial ini adalah sebesar 1,984 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan α = 5% dan df (n(104)-k(2)-1) 101 untuk pengujian 2 pihak. Rangkuman hasil pengujian hipotesis parsial dengan menggunakan program SPSS 21.0 disajikan pada tabel berikut:

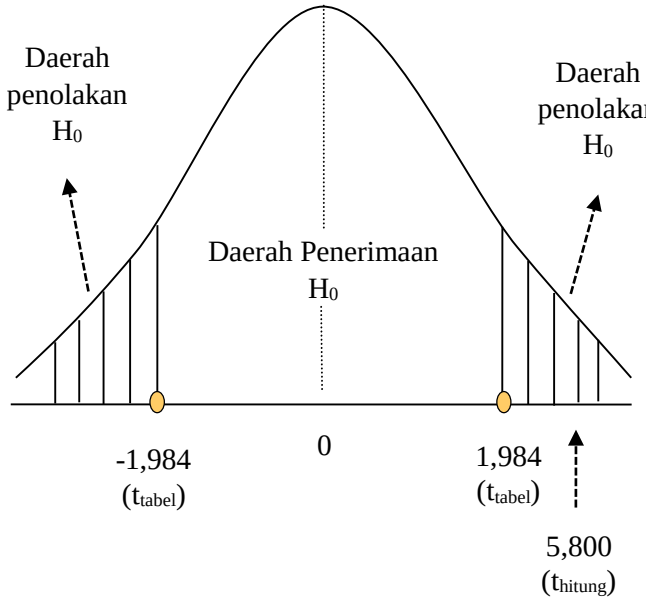
Tabel 4.11

Uji t (Parsial) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig. t	A	Keputusan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	5,800	1,984	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 21.0

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 5,608. Secara visual, daerah penolakan Ho maupun penerimaan Ho dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.7

Kurva Hipotesis Parsial Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Pada gambar kurva hipotesis parsial 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,800 ada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan Belanja Modal dan termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat dan menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dengan kata lain apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka Belanja Modal juga meningkat. Hal ini terjadi karena pendapatan merupakan bagian dari suatu anggaran, anggaran pemdapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja – belanja diantaranya termasuk Belanja Modal. Hasil ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perubahan pendapatan asli daerah pada umumnya mempengaruhi Belanja Modal (Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, 2009: 171).

Selanjutnya hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Barat sebesar 65,1% . Dengan adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Pendapatan Asli Daerah yang didapatnya digunakan sebagai sumber anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Bambang Suprayitno (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. I Putu Ngurah Panja Kartika Jaya dan A.A.N.B Dwiranda (2014) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengeruh signifikan terhadap belanja modal.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi yaitu APBD Kota Cirebon mengalami defisit dan Belanja Modal Kota Cirebon pada tahun 2014 mengalami penurunan yang disebabkan oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah yang cukup kecil, sehingga Kota Cirebon lebih mengandalkan Dana Perimbangan untuk menutupi kekurangan Pendapatan Asli

Daerah. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori-teori seperti yang dikemukan oleh Bahtiar Arif Muchlis dan Iskandar (2009:171) menyatakan bahwa Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja – belanja diantaranya termasuk Belanja Modal.

4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Perimbangan memiliki hubungan dengan Belanja Modal dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dan menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dengan kata lain apabila Dana Perimbangan meningkat, maka Belanja Modal juga meningkat. Hal ini terjadi karena Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting, sumber pendapatan ini digunakan untuk menutupi anggaran belanja. Hasil ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perubahan Dana Perimbangan pada umumnya mempengaruhi Belanja Modal (Deddi, Iswahyudi dan Maulidah 2012: 48).

Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Barat sebesar 18,7 %. Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Dana Perimbangan yang didapatnya digunakan sebagai sumber anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Yudi Satrya Aprizay, Darwanis, Muhammad Arfan (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi yaitu Kota Bogor minim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang lebih dominan Belanja Pegawai dibandingkan dengan Belanja Modal untuk fasilitas publik. Pendapatan Kota Bogor lebih ditopang oleh Dana Perimbangan di bandingkan oleh Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Pada dasarnya dana transfer dari pemerintah seharusnya di pergunakan untuk fasilitas publik untuk mendorong kemajuan perekonomian. Fenomena diatas membuktikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal karena pemerintah daerah lebih bergantung kepada dana transfer dari pusat meskipun pengalokasian dana tersbut di dominasi oleh Belaja Pegawai dibandingkan oleh Belanja Modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori-teori sebelumnya seperti dikemukan oleh Deddi, Iswahyusi dan Maulidah (2012:48), menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatam daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya kurang mencukupi untuk menutup anggran belanjanya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2014. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi realisasi Belanja Modal.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2014. Semakin tinggi Dana Perimbangan maka semakin tinggi realisasi Belanja Modal.

5.2 Saran

Dengan berbagai analisis dan pembahsan yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus terus meningkatkan pendapatan asli daerah nya dengan cara menggali penerimaan pajak daerah dan retribusi. Selain itu pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat harus dapat mengoptimalkan potensi unggulan yang berkaitan dengan pangan, modal bawaan berupa kekayaan alam yang terdapat di Jawa Barat yang sangat melimpah, Pemerintah harus dapat mengembangkan potensi tersebut untuk meningkatkan penerimaan yang berkaitan dengan potensi alam. Terdapat banyak sekali sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat yang bisa menaikan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat jika dikelola dengan benar.
2. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebab dengan meningkatnya alokasi belanja modal akan semakin meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan kembali pada meningkatnya

pendapatan daerah. Akan tetapi Pemerintah provinsi juga harus efektif dan efisien dalam menentukan alokasi belanja modal, sebab dengan tingginya belanja modal tersebut akan mengakibatkan biaya rutin lainnya (biaya pemeliharaan) menjadi lebih.

VI DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Ahmad Yani. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Andirfa, mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan yang sah terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar, 26 – 28 Juli 2007.

Antara Megapolitan. 2014. Pemkot Bogor Dinilai Minim Inovasi Kelola APBD. 22 Desember 2015. 09:57 WIB.

Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Bambang Suprayitno. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. Universitas Pancasila.

Deddi, Iswahyudi dan Maulidah. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.

Fajar News. 2015. APBD Kabupaten Cirebon Alami Defisit. 12 Oktober 2015. 22:43 WIB.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan : Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.

Harapan Rakyat.com. Rasio Belanja Modal Per Kapita Jabar Terendah Secara Nasional. 10 Juli 2015.cp

I Putu Ngurah dan A.A.N.B Dwinrandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Universitas Udayana.

Katadata. Terindikasi Tak Wajar, Dana Enam Daerah Diubah Menjadi Surat Utang. 2 Mei 2015.

Kompas.com. 2015. Pemda Masih Boros, Anggaran Hanya Untuk Belanja Pegawai. 25 Mei 2015 02:15 WIB.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Akuntasi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Ratri Paramita dan Syamsul Hadi.Yogyakarta. Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD Terhadap Anggaran Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Universitas Islam Indonesia.

Rudy Badrudin. 2012. Ekonomika Ekonomi Daerah. Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokai Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Singgih Santoso. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sumarmi Saptaningsih. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lilis Setyowati dan Suparwati Kus Yohana. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variable Intervening". *Jurnal Akuntasi*, Vol 9No.01. Juni 2012.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan* : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-14.

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: PT. Indeks.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika,* Jakarta.

Wandira A.G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accountng Analysis Journal*. Vol.1 (3):44-51.

Yudi Satrya, Arwanis dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Syiah Kuala.